

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pertumbuhan perekonomian suatu negara menjadi salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan suatu bangsa. Pembangunan ekonomi merupakan agenda penting bagi setiap negara dimana Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang menjadi tulang punggung perekonomian negara Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dapat terlihat dengan mampu bertahanya industri usaha kecil di tengah masalah krisis global yang terjadi pada tahun 2008. UMKM masih mampu bertahan dalam menjalankan fungsi penyelamatan di beberapa sub-sektor di Indonesia khususnya di Kota Malang.¹

UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam hal pembangunan ekonomi dan salah satu prioritas dalam menangani problematika yang tengah terjadi di Kota Malang yaitu, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran seperti pernyataan Bapak Sandiaga Uno pada saat menjadi Cawapres nomor urut 02 Rabu (5/12/2018). *“Angka pengangguran di Malang merupakan yang tertinggi di Jawa Timur. Padahal merupakan kota dengan segudang potensi”*. Disebutkan dengan angka oleh Pak

¹ Nikmah, Choirin, et. al. “Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah Pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember”. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. Volume. 1. 2014. Hal. 8

Sandi, setidaknya ada 32 ribu orang masih tidak memiliki pekerjaan. Parahnya satu dari tiga pengangguran tersebut lulusan sarjana.²

Jumlah angka pengangguran di Kota Malang terbilang tinggi, BPS juga mencatat jumlah angkatan kerja di Kota Malang mencapai 443.035 jiwa. Sedangkan jumlah warga yang berkerja sebanyak 411.042 orang.³

Pemberdayaan UMKM dianggap sebagai salah satu alternatif penting yang memiliki kemampuan hebat dalam mengurangi beban pengangguran yang dihadapi perekonomian Kota Malang dan menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan dan perencanaan konsep industrialisasi.⁴

Peran pemerintah Kota Malang berupaya untuk mengembangkan perekonomian daerah di bidang UMKM. Beranjak dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM merupakan implementator kebijakan pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan ekonomi daerah melalui UMKM berbasis ekonomi kreatif yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Malang.

Perkembangan pembangunan yang telah dicapai saat ini telah mengindikasikan adanya peningkatan perekonomian dan penurunan angka kemiskinan. Kualitas SDM masyarakat dapat dilihat salah satunya dari jumlah UMKM yang ada di Kota Malang. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat mengurangi tingkat kemiskinan di perkotaan maupun di daerah. Menurut data BPS pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di

² <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4331424/miris-angka-pengangguran-malang-tertinggi-di-jatim-sandi-janjikan-ini>. Diakses Rabu, 16 Oktober 2019. Pukul 10.18. WIB

³ <https://www.jawapos.com/jpg-today/15/11/2018/32-ribu-penganggur-di-malang-didominasi-lulusan-sarjana/>. Diakses Rabu, 16 Oktober 2019. Pukul 11.20. WIB.

⁴ Sonhaji Mochammad. "Analisis Hasil SE2016-Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Jawa Timur". Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur. 2018. Hal. 5.

Kota Malang berjumlah 35.49 jiwa dan 4.10 % presentase kemiskinan. Angka yang tidak sedikit untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Kota Malang.⁵

UMKM selalu menjadi pendeskripsian sektor yang memiliki peranan sangat penting, hal ini dikarenakan UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Menurut Nitisusastro, UMKM memiliki sejumlah kekuatan yang patut diketahui antara lain:⁶

Pertama, UMKM mampu mengembangkan kreatifitas usaha baru, *Kedua*, UMKM dapat melakukan inovasi, *Ketiga*, Ketergantungan usaha besar terhadap usaha kecil, *Keempat*, Daya tahan terhadap krisis.

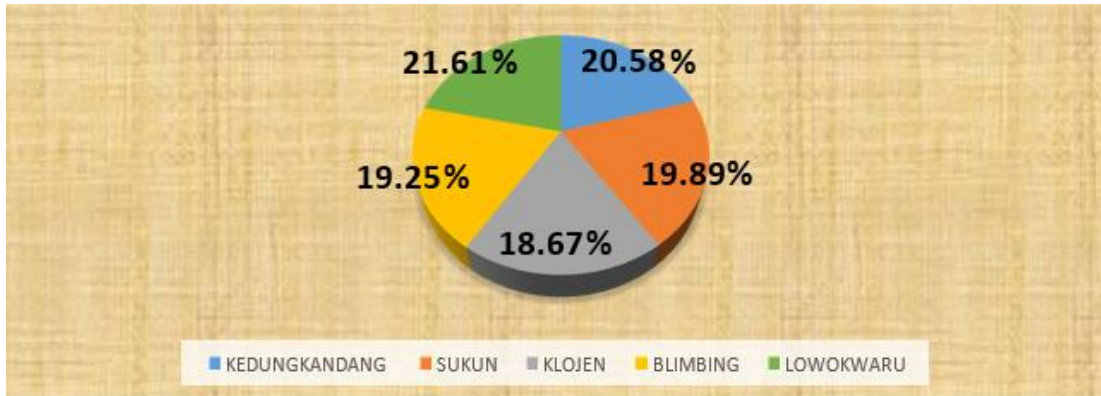
Potensi-potensi yang dimiliki UMKM sangat beragam mengingat UMKM merupakan salah satu bentuk usaha kreatif, hal tersebut terlihat pada UMKM yang ada di Kota Malang dimana dapat kita lihat terbagi dalam beberapa sektor usaha/perusahaan seperti, *Fashion*, kerajinan, makanan dan minuman. Sebaran usaha/perusahaan antar wilayah Kecamatan secara umum hampir merata. Usaha/perusahaan terbanyak ada di Kecamatan Lowokwaru dengan jumlah 24,4 ribu atau 21,61%. Sebanyak 20,58% usaha/perusahaan berada di Kecamatan Kedungkadang, 19,89% di Kecamatan Sukun, 19,25% di Kecamatan Blimbing, dan 18,67% di Kecamatan Klojen. Perbandingan data yang rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.⁷

⁵ Data BPS Kota Malang

⁶ Nitisusastro M. "Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil". Bandung: Alfabeta. 2012. Hal. 38-39.

⁷ Berita Resmi Statistik Kota Malang No. 35/05/35/Th. XV, 24 Mei 2017.

Gambar 1.1

Persentase Usaha/Perusahaan menurut Kecamatan di Kota Malang Tahun 2016

Sumber: Berita Resmi Statistik Kota Malang

Melihat kualitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya di Kota Malang masih tergolong rendah. Sejak tahun 2007 hingga 2018, dimana UMKM di Kota Malang belum memiliki peningkatan. Hal tersebut dinyatakan oleh Wali Kota Malang Sutiaji dalam acara *Interntional Reserch Conference on Economics and Business* di Hotel Savana pada (22/10/2018). Hal ini berbanding terbalik dengan kuantitas UMKM yang justru terus mengalami peningkatan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang memiliki Jumlah UMKM sebesar 156 unit. Angka ini terus meningkat mencapai 113000 unit pada tahun 2018.⁸

Melihat dari pernyataan dan jumlah data UMKM yang ada di kota malang, diharapkan dari segi kualitas dan kuantitas mampu untuk memiliki *Starting Point* yang jelas, sehingga dapat mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk lebih siap dalam meningkatkan segi kualitas usaha dan memiliki kontribusi

⁸<https://www.malangtimes.com/baca/32424/20181022/163200/sutiaji-sebut-kualitas-umkm-di-kota-malang-tidak-meningkat-sejak-2007>. Diakses 4 April 2019. Pukul 14.00. WIB.

lebih terhadap perekonomian bangsa dan mengurangi tingkat kemiskinan yang tengah menyelimuti masyarakat di Kota Malang.

UMKM telah menjadi prioritas dalam mengedepankan aktivitas sosial maupun ekonomi tentunya dengan memberdayakan masyarakat kecil dan menengah. Menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat Kota Malang khususnya kemandirian dalam bidang ekonomi. Dalam pengembangan usaha produktif, peran pemerintah cukup terlihat walaupun belum dapat menutupi realita yang ada. Dapat kita lihat usaha yang dilakukan pemerintah seperti pinjaman dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan dan lain sebagainya. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tanwil (BMT), dan beberapa lembaga keuangan syariah lainnya.⁹

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana produktif ke masyarakat dan merupakan lembaga resmi yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga-lembaga tersebut banyak membantu pemerintah dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi kesehatan, hingga pemerataan pendapatan. Kontribusi lembaga-lembaga tersebut sangat membantu dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di masyarakat saat ini.¹⁰

⁹ Shantha Dwi Wulansari., Achmad Hendra Setiawan. "Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik". Vol. 3. No. 1. 2014. Hal. 2.

¹⁰ Ibid.

Menurut Badan Pengawas Statistik (BPS), pada tahun 2012 Indonesia memiliki penduduk mayoritas beragama Islam dengan jumlah 1.288.502 juta jiwa. Melihat data tersebut potensi yang dimiliki sangat berperan penting dalam mendorong perkembangan aktifitas ekonomi Islam di Indonesia khususnya di Kota Malang. Undang-undang zakat terbaru telah dikeluarkan oleh pemerintah nomor 23 tahun 2011 dalam pasal 3, ayat 2 bahwa terkait pengelolaan zakat. Dimana undang-undang tersebut menggambarkan tujuan pengelolaan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹¹

Zakat merupakan salah satu instrument dalam Islam yang memberikan wadah kepada masyarakat dalam mengalokasikan harta atau kekayaan yang dimiliki guna mencapai kemaslahatan umat dan melengkapi dari rukun iman yang ketiga. Zakat yang dikelola dengan baik, secara penerimaan, pengambilan ataupun pendistribusiannya, seperti yang telah diterangkan dalam fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat dapat menjadi modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang sangat strategis dan berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat.¹²

Tujuan dari zakat itu sendiri tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu, mengetaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Pengelolaan zakat

¹¹ Ibid., 2-3

¹² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011. "Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat".

(amil) juga dituntut harus professional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan dana zakat secara produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengetaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka yang pada awalnya merupakan golongan mustahik, kemudian menjadi seorang muzakki.¹³

Pemanfaatan zakat produktif yang berasal dari umat Islam harus dikelola dan disalurkan secara efektif dan efisien suatu sisi pemberdayaan ekonomi umat. Dasar-dasar Islam dalam meminimalkan ketidaksetraan dan kesenjangan, secara mendasar diantisipasi untuk mempromosikan budaya “kohesi sosial” dan “kerja sama kreatif” dimana semua anggota masyarakat menikmati hak, keadilan dan jalan kewirausahaan. Dengan demikian Islam menganjurkan *philanthropy of practice* dan memperkuat makna dan ruang lingkup keadilan, pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan sambil menjaga kehormatan, nilai dan sentralitas kehidupan manusia. Oleh karena itu masyarakat memiliki hak dalam melaksanakan wirausaha guna meningkatkan perekonomian bangsa dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang merajalela, Semangat kewirausahaan diharapkan dapat mengokohkan taraf ekonomi dan sosial serta meningkatkan martabat bangsa, agama dan peradaban umat Islam.¹⁴

Telah banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah yang berbeda seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Shadaqah, ushur dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk memastikan sirkulasi kekayaan di semua stratifikasi sosial, terlepas dari

¹³ Siti Najma. “Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam”. Media Syariah. Vol. XVI No. 1. Juni. 2014. Hal. 145.

¹⁴ Bilal Ahmad Malik. “Philanthropy in Practice: Role of Zakat in the Realization of Justice and Economic Growth”. International Journal of Zakat 1(1). 2016. Page. 65.

kasta, warna kulit, atau afiliasi agama. Jadi, sejak zaman Nabi, lembaga zakat telah berperan dalam transformasi ekonomi umat Islam. Namun sangat disayangkan bahwa selama hampir satu abad ketika sebagian besar tanah muslim diperbudak di bawah pemerintahan kolonial, pengumpulan dan distribusi dana zakat ditinggalkan dari kerangka kerja yang dilembagakan. Sejak itu, seluruh administrasi zakat terdesentralisasi dan kewajibannya menjadi sukarela semata tergantung pada kesalehan individu, yang memberi atau tidak sekalipun. Melihat kegagalan fungsi lembaga zakat membawa implikasi negatif seperti kemiskinan, buta huruf dan ketidakadilan ekonomi. Mengingat kerentanan ekonomi dalam masyarakat muslim kontemporer, sangat penting untuk menghidupkan kembali pelebagaan zakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perwujudan keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi dan minimalisasi rasio kemiskinan.¹⁵

Banyaknya badan amil zakat dan lembaga-lembaga zakat yang berdiri di tengah masyarakat cukup memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat khususnya daerah. Salah satu Lembaga Amil Zakat yaitu LAZISMU adalah sebuah lembaga tingkat nasional yang berkhidmad dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga, perusahaan maupun instansi lainnya di daerah jawa timur. LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh menteri agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK no. 457/21 November 2002. Guna

¹⁵ Ibid.

memenuhi ketentuan perundang-undangan RI, LAZISMU dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS melalui SK kemenag RI No. 730 Tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor yaitu faktor *Pertama*, fakta bahwa Indonesia masih diselimuti dengan kemiskinan yang meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang masih lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan masalah ekonomi maupun sosial di tengah masyarakat.

LAZISMU memiliki beberapa kantor yang berdiri dari cabang kota, maupun cabang kabupaten di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya ialah LAZISMU Kota Malang, memulai aktivitas dalam menjalankan program-program yang dilaksanakan, LAZISMU efektif memulai aktivitasnya pada tanggal 1 Mei 2016.

Dikarenakan Melihat problematika masyarakat muslim yang ada di Kota Malang, khususnya dari segi kemiskinan, kurangnya optimalisasi zakat, infaq, dan shadaqah dan masih banyak yang terjerat transaksi pinjam-meminjam uang atau rentenir. Oleh karenanya dalam program *economic empowerment* terdapat program penguatan usaha mustahik, dan pendirian usaha untuk mustahik. Tidak lain dengan adanya program tersebut dikarenakan keresahan yang terjadi dimasyarakat khususnya umat muslim di Kota Malang.¹⁶

Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan, problematika pengangguran dan kemiskinan yang tengah menyelimuti masyarakat khususnya umat muslim di Kota Malang, peran penting UMKM dalam pemberdayaan ekonomi umat, yang seharusnya dikembangkan lebih jauh dan berkesinambungan oleh pemerintah, badan maupun lembaga-lembaga khususnya yang tengah berkecimpung di dunia zakat, dan pengaruh penting juga yang dimiliki oleh badan maupun lembaga zakat di Kota Malang dalam memberdayakan ekonomi umat muslim. Oleh karena itu, menjadi sebuah alasan bagi peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui, dan meneliti lebih jauh dan lebih dalam. Sehingga melakukan penelitian yang berjudul “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (Studi pada LAZISMU Kota Malang)”.

¹⁶ www.lazismukotamalang.com. Diakses 4 April 2019. Pukul 14.30. WIB.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Dana Zakat Produktif dalam Perkembangan UMKM melalui proses pengelolaan dalam bentuk pengumpulan, pendistribusian dan Pendayagunaan oleh LAZISMU Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Peran Dana Zakat Produktif dalam Perkembangan UMKM melalui proses pengelolaan dalam bentuk pengumpulan, pendistribusian dan Pendayagunaan oleh LAZISMU Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis: Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat melahirkan konsep ataupun sumbangan berupa gagasan ataupun ide terkait “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (Studi pada LAZISMU Kota Malang)” dan memberikan wawasan keilmuan bagi penulis maupun bagi masyarakat terdidik.

b. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak praktis bagi regulator, fasilitator, dan pengelola Dana Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sadaqah Muhammadiyah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (Studi pada LAZISMU Kota Malang)” apakah telah sesuai dengan praktik yang ada di lapangan.

c. Manfaat Akademis: diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dalam khazanah prinsip ekonomi Islam guna memperkaya literatur kepustakaan mengenai “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (Studi pada LAZISMU Kota Malang)”.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang ada maka, peneliti memberikan batasan. Karena melihat adanya keterbatasan waktu, pikiran dan sarana yang ada maka, peneliti hanya membatasi dan membahas mengenai, proses pengelolaan dana zakat produktif, melalui bentuk pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan di LAZISMU Kota Malang.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan penelitian ini antara lain:

South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 13, Issue 1(August) 2017. Oleh Mohd Asri Mohd Ali, Mohd Danial Afiq Bin Khamar Tazilah, Adib Izzat Bin Shamsudin, Faris Ridhwan B. Faisal Shukri, Nik Muhammad Farith Adruc B. Nik Adelin, dan Wan Muhammad Syafiq B. Wan Zainol Zaman. Dengan judul “Factors That Influence The Zakat Collection Funds: A Case In Kuantan”. Poin pembahasan dalam jurnal adalah untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi penagihan dana pembayar zakat. Untuk penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan survei kuesioner yang diadaptasi dan diadopsi dari

penelitian sebelumnya mengenai niat untuk membayar zakat oleh pembayar. Faktor-faktor yang menganalisis dalam penelitian ini adalah "kepercayaan pembayar zakat", "tingkat pemahaman tentang zakat", dan "sikap terhadap zakat". Institusi diikuti oleh kepercayaan dan tingkat pemahaman. Berdasarkan survei, temuan menunjukkan bahwa partisipasi pada membayar zakat melalui lembaga zakat tidak hanya dipengaruhi oleh sikap pembayar tetapi juga kepercayaan mereka terhadap lembaga untuk menangani dana zakat dikumpulkan dengan baik dan juga tingkat pemahaman mereka tentang zakat.

International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 18 (Special Issue, September 2012). Oleh Adel Sarea. Dengan judul “Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach”. Poin pembahasan dalam jurnal adalah menentukan kebutuhan zakat sebagai sistem keuangan untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi. Meninjau kerangka konseptual ekonomi Islam untuk mengusulkan model alternatif agar untuk berkontribusi secara signifikan kepada umat dan melayani bangsa-bangsa. Zakat dianggap sebagai salah satu metode yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, yang berarti, ketika orang membayar zakat tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan sebaliknya. Dengan kata lain, komitmen umat Islam untuk membayar zakat kepada delapan kategori untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam hal redistribusi kekayaan antara Muslim.

International Journal of Education and Research Vol. 2 No. 5 May 2014. Oleh Muhammad Syukri Salleh. Dengan judul “Organizational and Definitional

Reconfiguration of Zakat Management”. Poin pembahasan dalam jurnal adalah Pencapaian yang menggembirakan dari manajemen zakat kontemporer tidak diragukan lagi dan patut dipuji, tetapi pemikiran tentang menghindari cegukan di sepanjang jalan diperlukan. Berdasarkan tentang pengalaman Malaysia, mencoba mengeksplorasi menjadi dua tujuan sederhana. Pertama, mengidentifikasi cegukan manajemen zakat dan kedua, untuk berusaha untuk menyelesaikan cegukan agar memungkinkan transformasi zakat yang lebih lancar.

Itu akan diperlihatkan bahwa kejadian cegukan sebagian besar terletak antara lain dalam organisasi struktur dan penggunaan definisi dalam manajemen zakat itu sendiri, maka kami namakan mereka cegukan struktural dan cegukan definisi masing-masing. Dalam kasus yang pertama, adalah masalah profesionalisme versus tradisionalisme dan sentralisasi versus desentralisasi, sedangkan dalam kasus nanti, ada masalah penggunaan Islam definisi konsep terkait zakat versus definisi etnosentris barat sama. Solusi yang ditentukan untuk cegukan struktural adalah konfigurasi ulang sentralisasi dan desentralisasi, dan profesionalisme dan tradisionalisme.

Untuk mendefinisikan cegukan tersebut, penelitian ini mendukung konfigurasi ulang definisi zakat terkait konsep-konsep yang didasarkan pada sumber-sumber Islam yang otentik, bukan berdasarkan eklektik-akomodasi yang termodifikasi definisi konsep etno-sentris barat.

The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015). Oleh Yoghi Citra Pratama. Dengan judul “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”. Poin pembahasan

dalam jurnal tersebut adalah agar program zakat produktif dapat berjalan dengan efektif dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara signifikan, diperlukan upaya dari seluruh umat Islam baik pemerintah, badan amil zakat, masyarakat di Indonesia, dalam mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya, sehingga zakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Disamping itu, agar efektif dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan kemandirian usaha mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna dengan salah satunya melakukan pendampingan dalam mengelola dana bagi yang membutuhkan, sehingga dana yang dialokasikan kepada mustahik pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraannya dan membawanya keluar dari kemiskinan.

Media Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014. Oleh Siti Najma. Dengan judul “Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam”. Poin pembahasannya adalah Zakat Produktif bisa dioptimalkan pemanfaatannya dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, melalui pengembangan kewirausahaan bagi mustahik. Mustahik dapat mengembangkan usahanya secara mandiri dan menjadi seorang muzakki. Semakin banyak mustahik yang bisa meningkat posisinya menjadi muzakki, tingkat kemiskinan umat Islam menurun, dan akhirnya dapat mengokohkan taraf ekonomi dan sosial serta meningkatkan martabat bangsa, agama dan peradaban umat Islam.

Mengubah mustahik menjadi wirausahawan yang berhasil dan mandiri secara ekonomi bukan perkara yang mudah. Lembaga zakat yang memiliki peran sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat, harus menyiapkan sebuah design

pemberdayaan yang komprehensif dan bekerjasama dengan lembaga lainnya seperti lembaga keuangan mikro syariah, bank syariah, pemerintah, dan lain-lain. Tahap-tahap yang bisa dilalui lembaga zakat dalam rangka mewujudkan mustahik menjadi wirausahawan yang sukses, diantaranya: *Pertama*, Insentif ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) mustahik. *Kedua*, Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan untuk memberikan wawasan kewirausahaan sehingga dapat menimbulkan motivasi berwirausaha sekaligus memiliki teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. *Ketiga*, Pembiayaan usaha, berupa qardhul hasan. *Keempat*, Kemitraan usaha bertujuan untuk memperkuat kemampuan bersaing usaha kecil mustahik. Lembaga zakat bisa menjadi fasilitator antara mustahik dan mitra.

Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam
Puncak dari keberhasilan lembaga zakat dalam melakukan pemberdayaan kewirausahaan umat adalah apabila usaha yang dijalani mustahik sampai tahap kemandirian usaha. Tentu saja dengan sendirinya, apabila kemandirian usaha sudah dicapai mustahik, maka posisi mustahik telah berubah menjadi muzakki.

Diponogoro Jurnal of Economic Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014, Halaman 1-15. Oleh Sintha Dwi Wulansari, Achma Hendra Setiawan. Dengan judul “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”. Poin pembahasan dalam jurnal tersebut bahwa Dana Zakat mengenai penghimpunan, pengelolaan dan penghimpunan baik dana zakat, infak dan sadaqah serta hasil analisis data yang telah dilakukan, bahwa: *Pertama*, Penghimpunan dana zakat, Rumah Zakat menyediakan

berbagai sarana kepada para muzakki, dana zakat yang terhimpun semuanya disalurkan pada program senyum mandiri, senyum juara, senyum sehat dan senyum lestari. Dalam program senyum mandiri menggunakan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan bantuan modal. *Kedua*, Berdasarkan hasil Uji Paired T-test dapat diketahui bahwa modal, omzet usaha dan keuntungan usaha mustahik adalah berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat. *Ketiga*, Masih terdapat kendala dalam pengaplikasian program senyum mandiri, karena terdapat di beberapa mustahik yang masih menggunakan bantuan modal tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dan kesehatan. Meskipun begitu Sangat memungkinkan bahwa bantuan modal yang diberikan oleh Rumah Zakat dapat mengubah mustahik menjadi muzakki.

International Journal of Zakat 1 (1) 2016. Page 64-77. Oleh Bilal Ahmad Malik. Dengan judul “Philanthropy in Practice: Role of Zakat in the Realization of Justice Economic Growth”. Poin pembahasannya adalah dimana realitas yang berlaku di seluruh dunia muslim, sungguh terlihat menyedihkan seperti kondisi kemiskinan, buta huruf, kekurangan gizi, kurangnya keadilan sosial dan perpecahan kelas merupakan manifestasi yang menonjol. Penyebab di balik komposisi yang jelek ini bukanlah konseptualisasi sosial dan ekonominya, tetapi kegagalan otoritas public, LSM dan organisasi keagamaan untuk membuktikan kekuatan dan penerapannya. Dalam latar belakang ini, tugas terpenting intelektual, politisi, ekonom dan pembuat kebijakan muslim adalah mengubah lembaga zakat menjadi gerakan filantropis

praktis yang akan mempromosikan budaya kerja sama dan keadilan sosial. Akibatnya, akan meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran di seluruh umat muslim di dunia.

Pemerintah muslim harus mendirikan organisasi filantropi yang maju dan memberi dukungan apapun yang mereka butuhkan. Dalam masyarakat muslim, praktik penghindaran zakat sama saja dengan mempromosikan korupsi dan kurang berkembang. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang efisien, dari mulai pengumpulan hingga tingkat pendistribusian, menjadi tanggung jawab utama pemerintah, masyarakat sipil dan setiap individu muslim untuk berkontribusi dalam bagian yang seharusnya sehingga bagian yang lebih lemah dari masyarakat diperkuat dan terangkat. Peneliti mengusulkan gerakan filantropis yang dinamis untuk mengubah institusi zakat menjadi persatuan simbolis ini, sebagai imbalannya, dimana mengekspresikan Islam sebagai komunitas yang kuat, adil dan etis.

Makna filantropis dari zakat adalah berkontribusi terhadap penciptaan komunitas model semacam itu. Oleh karena itu umat Islam, sebagai dermawan aktif, harus membangun sistem ekonomi yang terorganisir dari tingkat regional hingga global. Dalam hal administrasi zakat, pembayaran setiap individu harus mempertimbangkan anggota keluarga mereka terlebih dahulu dalam melaksanakan tugas penting ini. Dengan begitu peran zakat akan semakin mendalam dan dampaknya akan dialami di mana-mana. Seluruh masyarakat akan menikmati berkahnya dan setiap individu akan bebas dari tindak kejahatan dan kegilaan.

Jurnal Penelitian Vol, 10, No, 2, Agustus 2016. Oleh Murtadho Ridwan. Dengan judul “Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal”. Poin pembahasan dalam jurnal tersebut adalah UPZ Desa Wonoketingal menggabungkan dua model *fundraising*, yaitu *Direct Fundraising* dan *Indirect Fundraising*. *Indirect Fundraising* digunakan untuk mensosialisasikan program melalui pengumuman di pengajian rutin ataupun pertemuan warga. Setelah itu, pengurus UPZ yang telah dibagi menjadi 6 wilayah melakukan pengumpulan secara langsung dengan mendatangi rumah warga. Kedua model itu dijalankan secara bersamaan oleh pengurus UPZ Desa Wonoketingal agar pengumpulan dana ZIS dapat optimal.

Sementara model distribusi dana ZIS yang diterapkan UPZ Desa Wonoketingal adalah model konsumtif tradisional dan model produktif kreatif. Model konsumtif tradisional digunakan untuk mendistribusikan zakat fitrah, zakat mal bagi fakir miskin, dan dana infak sedekah, baik yang berupa dana santunan anak yatim ataupun pembagian daging kurban. Sedangkan model produktif kreatif digunakan untuk distribusi dana zakat mal yang diperuntukan bagi *gharim*.

Skripsi Jurusan Muamalah. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015. Oleh Siti Lestari. Dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi”. Poin Pembahasan *Pertama*, pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ada dua program yaitu pertama, pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin

berwirausaha. *Kedua*, memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1000.000, - untuk menambah modal usaha. Adapun untuk program tersebut belum terlaksana, dengan program yang di alokasikan BAZNAS kabupaten Kendal mampu memberdayakan ekonomi mustahik, dimana mustahik sangat tertolong dengan mendapatkan bantuan zakat produktif dan merasa kehidupannya sudah lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Faktor penghambat dalam pengelolaan zakat produktif dalam penelitian tersebut adalah (1) pegawai BAZNAS juga PNS aktif, (2) dana yang sangat kurang dibandingkan dengan mustahik yang ada, (3) kurangnya tingkat kesadaran muzakki dan wajib zakat, (4) susahny mencari mustahik yang benar-benar bisa di percaya. Sedangkan faktor pendukung zakat produktif yaitu: (1) Niat *lillahita'ala* pengurus BAZNAS kab. Kendal, (2) Kerjasama antar Pengurus BAZNS, pihak Kecamatan, KUA, dan Desa, (3) Niat kuat mustahik untuk menjadi muzakki.